

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 21 Juli 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas.com	Senin, 20 Juli 2020	Program Padat Karya Tunai di Jalan Nagrek-Rajapolah Terus Digenjot	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot Program Padat Karya Tunai (PKT) di bidang jalan dan jembatan untuk mendukung mitigasi dampak sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19. https://properti.kompas.com/read/2020/07/20/200225021/program-padat-karya-tunai-di-jalan-nagrek-rajapolah-terus-digenjot?page=all https://www.timesindonesia.co.id/read/news/285110/pada-t-karya-p3tgai-kementerian-pupr-ri-di-bbws-citanduy-dilaksanakan-pada-363-lokasi
2	Timesjatim.com	Senin, 20 Juli 2020	Kementerian PUPR Memastikan Tol Pertama di Sulawesi Utara Siap Beroperasi	Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus berupaya untuk meningkatkan layanan infrastruktur jalan dan jembatan, di Sulawesi Utara, baik jalan tol maupun jalan nasional. Ini dilakukan untuk mendukung jalur logistik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat Pandemi Covid-19. Saat ini, ruas jalan tol baru Manado-Bitung (Mabit) seksi 1 Manado-Airmadidi 14 km serta sebagian ruas seksi 2 hingga Kauditan 7 km yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah siap untuk dibuka. https://www.timesjatim.com/berita/138115/kementerian-pupr-menyatakan-tol-pertama-di-sulawesi-utara-siap-beroperasi https://properti.kompas.com/read/2020/07/20/123227721/tol-beroperasi-manado-bitung-hanya-30-menit https://www.cnbcindonesia.com/news/20200720143904-4-173995/di-tengah-corona-jokowi-buka-2-tol-baru-di-ri
3	Nusabali.com	Selasa, 21 Juli 2020	KSM Desa Bedulu Bangun TPS-3R Dibantu Kementerian PUPR Rp 600 Juta	Mimpi masyarakat Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, untuk memiliki Tempat Pengolahan Sampah – Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) representatif makin jadi kenyataan. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali memberikan bantuan Rp 600 juta untuk membangun fisik TPS-3R tersebut. https://www.nusabali.com/berita/77779/ksm-desa-bedulu-bangun-tps-3r https://www.antaranews.com/berita/1621742/kabupaten-gianyar-bangun-pengolahan-sampah-di-bedulu
4	Medcom.com	Senin, 20 Juli 2020	Rusunawa di Yogyakarta Tunggu Serah Terima	Rumah Susun Sewa Tegalrejo Yogyakarta untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ditargetkan dapat dihuni tahun ini. Rusunawa yang selesai dibangun pada akhir 2019 tersebut hingga kini masih menunggu proses serah terima ke Pemerintah Kota Yogyakarta. https://www.medcom.id/properti/news-properti/IKYxdYVkrusunawa-di-yogyakarta-tunggu-serah-terima
5	Potretnews.com	Senin, 20 Juli 2020	Sebelum Hari Kemerdekaan RI, Ruas Tol Pekanbaru-Dumai Siap Beroperasi	Dua ruas tol yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans - Sumatera tuntas konstruksinya dan siap dioperasikan sebelum Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2020. Kepastian itu disampaikan Kementerian PUPR.

				https://www.potretnews.com/berita/baca/2020/07/20/sebelum-hari-kemerdekaan-ri-ruas-tol-pekanbarudumai-siap-beroperasi
6	Antaranews.com	Senin, 20 Juli 2020	PUPR siapkan dua tahap penanganan tanggap darurat Luwu Utara	Kementerian PUPR menyiapkan dua tahap perencanaan penanganan tanggap darurat Luwu Utara setelah terjadi banjir bandang di enam kecamatan pada Senin (13/7) lalu. https://www.antaranews.com/berita/1622646/pupr-siapkan-dua-tahap-penanganan-tanggap-darurat-luwu-utara
7	Timesindonesia.com	Senin, 20 Juli 2020	Kementerian PUPR RI, Progres Pembangunan Bendungan Leuwikeris Capai 59,52 persen	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendukung Provinsi Jawa Barat untuk terus menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Untuk meningkatkan produktivitas petani, Kementerian PUPR RI membangun Bendungan untuk menjamin suplai air irigasi yang sebelumnya mengandalkan tadah hujan. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/284915/kementerian-pupr-ri-progres-pembangunan-bendungan-leuwikeris-capai-5952-persen
8	Koran Tempo, halaman Ekonomi & Bisnis 4	Selasa, 21 Juli 2020	Pemerintah Evaluasi Bank Penyalur Pembiayaan Perumahan	Pemerintah berencana mengevaluasi 42 bank pelaksana dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana komitmen yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) telah dan akan dilaksanakan.

Judul	Pemerintah Evaluasi Bank Penyalur Pembiayaan Perumahan	Tanggal	Selasa, 21 Juli 2020
Media	Koran Tempo, halaman Ekonomi & Bisnis 4		
Resume	Pemerintah berencana mengevaluasi 42 bank pelaksana dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana komitmen yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) telah dan akan dilaksanakan.		

EKONOMI DAN BISNIS

Pemerintah Evaluasi Bank Penyalur Pembiayaan Perumahan

Persyaratan penyaluran kredit perumahan bersubsidi dinilai masih memberatkan konsumen.

ED/IS | 21 JULI 2020



Pembangunan rumah bersubsidi di Bumi Sukajati, Sukabumi, Jawa Barat, 8 Juli 2020. Tempo/Tony Hartono

JAKARTA – Pemerintah berencana mengevaluasi 42 bank pelaksana dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana komitmen yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) telah dan akan dilaksanakan.

Eko menuturkan kendala yang mungkin saja ditemui di lapangan di antaranya kesiapan rumah, kesiapan calon debitur, serta kesiapan bank atau perbankan dalam menjalankan aplikasi. "Ini semua topik yang akan kami klarifikasi. Bila bank tidak bisa meyakinkan kami dalam pencapaian target di sisa waktu, akan dilakukan realokasi kuota," ujar Eko kepada *Tempo*, kemarin.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Arief Sabaruddin, mengatakan ada 42 bank yang akan dievaluasi. Pemerintah ingin penyaluran FLPP bisa tepat sasaran dan akuntabel. Menurut dia, sejauh ini masih ada bank yang penyalurannya di bawah target. "Kalau masih ada yang berada di bawah target, akan ada pergeseran kuota," ujarnya.

Menurut dia, setidaknya ada 10 bank yang kinerjanya sesuai dengan perjanjian kerja sama operasional (PKO) yang sudah dilakukan. Arief menuturkan masih ada bank yang belum mencapai target 50 persen, bahkan ada tiga bank yang belum menyalurkannya sama sekali. Arief mengatakan pandemi Covid-19 menjadi salah satu penghambat penyaluran FLPP. "Pandemi menjadi salah satu kendala, tapi mereka didorong untuk melakukan inovasi, dari pelayanan bagaimana, harus ada strategi yang harus ikuti kondisi *new normal*, terobosan menjadi bobot," ujar Arief.

Hingga saat ini, PPDPP mencatat setidaknya sebanyak 76.914 dari 102.500 unit rumah bersubsidi dengan skema FLPP sudah disalurkan. Apabila kuota tersebut habis, kata Arief, masyarakat akan dialihkan pada subsidi selisih bunga (SSB) yang kuotanya sekitar 150 ribu unit. Sampai saat ini, realisasinya baru mencapai sekitar 6.000 unit.

Direktur Keuangan PT Bank Tabungan Negara, Nixon L.P. Napitupulu, mengatakan kuota FLPP BTN tahun ini sudah habis disalurkan kepada masyarakat. Pada Mei lalu, ujar Nixon, Kementerian PUPR memberikan tambahan kuota sekitar 1.600 unit yang dipindahkan dari bank lain. Sesuai dengan ketentuan, Nixon melanjutkan, kuota penyaluran selalu dikaji secara periodik, terutama dari sisi kinerja dan realisasinya.

Secara kecepatan, Nixon berujar, BTN bisa menyalurkan pembiayaan rumah bersubsidi pada kisaran 10-15 ribu unit dalam sebulan di seluruh Indonesia. Dalam kondisi normal, kata dia, biasanya kuota habis sebelum akhir tahun. "Ini kami juga mesti mengatur ritme petugas di cabang agar seimbang penyaluran KPR (kredit pemilikan rumah) subsidi untuk semua skema," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menilai masih ada bank yang kesulitan menyalurkan KPR karena rumitnya persyaratan penyaluran FLPP. Persyaratan yang diberikan pemerintah ada yang memberatkan konsumen. Padahal, Junaidi menuturkan, bank pelaksana di luar BTN sudah terbiasa menyalurkan kredit dengan syarat mudah.

"Ketika masuk pada program FLPP, banyak sekali persyaratannya. Kemudian, menghadapi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah tidak gampang, karena perlu perhatian khusus," ujar Junaedi.

Dia mengatakan penyaluran kredit komersial oleh bank cenderung lebih mudah ketimbang penyaluran KPR. Belum lagi penerapan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) masih sering menemui kendala.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Totok Paulus Lusida, mengatakan syarat penyaluran FLPP bagi pekerja nonformal, masyarakat berpenghasilan tidak tetap, atau karyawan kontrak sangat ribet. Menurut dia, pemerintah dan perbankan juga perlu mendorong inovasi dalam penyaluran FLPP agar konsumen akhir (*end-user*) yang berpenghasilan rendah terpenuhi.

"Sampai saat ini saja, bank tidak bisa *upload* pada SiKasep. Ini bisa menghambat. PPDPP dan Kementerian PUPR mesti cari jalan keluar supaya target terpenuhi," ujar Totok.

LARISSA HUDA

Kejar Target Rumah Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong penyerapan pembiayaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Hingga 17 Juli lalu, realisasi penyaluran FLPP mencapai sekitar 75 persen.

(unit rumah)

Tahun	FLPP	Target
2015	76.489	59.090
2016	58.469	48.295
2017	23.763	40.000
2018	57.939	42.000
2019	77.564	68.858
2020	77.050	102.000 (*per 17 Juli)

Realisasi Bank Pelaksana (unit rumah)

1. BTN	:	39.800
2. BTN Syariah	:	6.591
3. BRI Syariah	:	5.275
4. BNI	:	7.682
5. ARTHA GRAHA	:	1.027
6. BPD PAPUA	:	171
7. MANDIRI	:	1.415
8. BRI	:	2.205
9. BANK BJB	:	2.629
10. BANK BJB SYARIAH	:	357
11. BPD SUMUT SYARIAH	:	0
12. BPD SUMUT	:	305
13. BPD SUMSEL BABEL	:	989
14. BPD KALBAR	:	899
15. BPD JAMBI	:	840
16. BANK SULSELBAR	:	520
17. BPD NTB	:	1.077
18. BUKOPIN	:	0
19. BPD NTT	:	291
20. BANK SULSELBAR SYARIAH	:	415
21. LAINNYA	:	4.563

SUMBER: PPDPP KEMENTERIAN PUPR

Activa